

Judul : Lockdown jadi opsi
Tanggal : Sabtu, 19 Juni 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Lockdown Jadi Opsi



TERPAPAR COVID-19: Suasana kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Pihak Kesejahteraan DPR RI harus memperketat protokol kesehatan di lingkungan gedung parlemen dan meniadakan sejumlah rapat komisi karena sebanyak 46 orang, termasuk 11 anggota dewan, terpapar covid-19.

Dorongan agar pemerintah memberlakukan PPKM secara menyeluruh dan serentak juga disampaikan oleh perhimpunan dokter spesialis.

PUTRI ANISA YULIANI
putriani@mediaindonesia.com

PEMERINTAH Provinsi DKI tidak menutup kemungkinan mengambil kebijakan menarik rem darurat berupa karantina wilayah atau *lockdown*. Hal itu mengingat pertambahan kasus covid-19 yang makin tinggi.

Pada Kamis (17/6), angka penularan kasus covid-19 di DKI Jakarta melonjak pesat hingga mencapai 4.144.

"Kami bersama Forum Koor-

dinasi Pimpinan Daerah (Forko-pimda) akan melihat dalam 1-2 hari ke depan, apakah kita terus melaksanakan PPKM mikro sampai 14 hari ke depan atau ada kebijakan lain di tengah 14 hari itu," ungkap Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria, kemarin.

Saat ini pihaknya masih terus mengawasi penegakan protokol kesehatan di masyarakat. Pemprov DKI juga menginstruksikan perkantoran di wilayah zona merah untuk menetapkan *work from home*

(WFH) hingga 75%. Uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) tahap dua pun telah dihentikan. Adapun izin bagi *live music* di kafe dan restoran akan dikaji kembali.

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau warga untuk berakhir pekan di rumah saja. Ia pun meminta seluruh petugas untuk menegakkan aturan protokol kesehatan dengan optimal. Tidak hanya itu, petugas juga harus turut membantu melancarkan program vaksinasi covid-19 di Ibu Kota. "Saya sampaikan sekali lagi kepada seluruh masyarakat bahwa Jakarta sedang menghadapi puncak

baru penambahan kasus," tegas Anies.

Di Yogyakarta, *lockdown* juga menjadi pertimbangan. Menurut Gubernur DIY Sri Sultan HB X, pihaknya sudah berusaha mengontrol penyebaran kasus covid-19 hingga lingkungan RT/RW. "Kalau gagal terus, *arep ngopio menek?* (Kalau gagal terus, mau berbuat apa lagi?) Satu-satunya cara ya *lockdown*. *Totally* kan gitu?."

Dorongan agar pemerintah menerapkan PPKM secara menyeluruh dan serentak terutama di Pulau Jawa juga disampaikan oleh perhimpunan dokter spesialis, yang terdiri atas Perhimpunan Dokter

Paru Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (Perdatin), dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (Perki).

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembatasan kehadiran fisik di gedung parlemen dibatasi hanya 20%-25% dan sisanya virtual.

Kebijakan ini diberlakukan setelah Sekjen DPR Indra Iskandar mengungkapkan 46 anggota dewan dan staf terpapar covid-19. "Data hingga hari ini (kemarin) yang terpapar covid-19, yaitu tenaga ahli 11 orang,

pamdal, anggota TV parlemen 7 orang, PNS 17 orang, dan anggota DPR 11 orang."

Tingkatkan sinergi

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan sinergi pemangku kepentingan dan masyarakat dalam menghadapi ledakan kasus positif covid-19 di Tanah Air harus diwujudkan agar ancaman kolaps sistem pelayanan kesehatan bisa dihindari. "Masyarakat bisa berpartisipasi menanggulangi pandemi dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan," ungkapnya, kemarin. (AT/Ata/Taj/RO/Cah/X-11)

